

BAB I

PENDAHULUAN

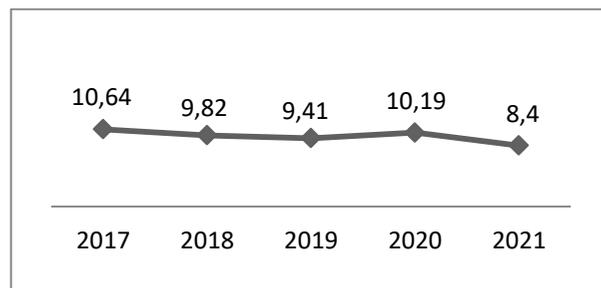
A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan merupakan suatu bentuk usaha memperbaiki kualitas guna menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata (Lestari *et al.* 2021). Pembangunan memiliki pengaruh positif dalam kehidupan manusia, begitupun dengan pembangunan ekonomi. Salah satu permasalahan pembangunan yang sering dibahas ialah pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berhubungan dengan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang ada dalam proses pembangunan di Indonesia.

Kemiskinan masih menjadi topik penting ekonomi dunia. Indonesia sebagai negara berkembang juga masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal (Hardinandar, 2019). Terkait dengan isu kemiskinan dan kesejahteraan dunia yang diangkat oleh Bank Dunia, terlihat bahwa kemiskinan di dunia terus berkurang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Adapun data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2010. Data menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia yang semula 13,33% di tahun 2010 turun menjadi 8,4% di tahun

2021. Kemiskinan di Indonesia sedikit demi sedikit mulai terurai karena setiap tahunnya strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan.

Berikut ini merupakan grafik yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Indonesia periode tahun 2017 hingga 2021:



Sumber : Badan Pusat Statistik (2022)

GAMBAR 1.1.

Tingkat Kemiskinan Indonesia Tahun 2017-2021 (persen)

Dari grafik di atas terlihat bahwa rata-rata setiap tahun tingkat kemiskinan di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Namun, di tahun 2020 sempat terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada berubahnya seluruh aktivitas masyarakat terutama aktivitas ekonomi. Melemahnya daya beli masyarakat hingga pelemahan ekonomi daerah dan nasional merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19.

Pemulihan ekonomi yang dilakukan terus berlanjut dilakukan hingga tingkat kemiskinan kembali menunjukkan penurunan di tahun 2021. Kinerja industri pengolahan Indonesia, sektor perdagangan, serta mobilitas di tempat belanja juga menunjukkan arah positif pemulihan ekonomi. Penguatan

beragam indikator ini didorong aktivitas APBN dalam menstimulus aktivitas ekonomi melalui intensifnya penanganan pandemi, vaksinasi nasional, serta program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Realisasi belanja negara hingga Maret 2021 tumbuh signifikan sebesar 15,6%. Konsumsi rumah tangga sebagai kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa terus terjaga.

Pemulihan ekonomi mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Hingga Februari 2021 tingkat pengangguran turun menjadi 6,26% dari 7,07% pada Agustus 2020. Ekonomi Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif pada kuartal II-2021 seiring dengan pemulihan ekonomi yang membaik. Sejalan dengan itu, strategi pengentasan kemiskinan yang diusulkan oleh Bank Dunia didasarkan pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah masih mengembangkan rencana ini (djk.kemenkeu.go.id, 2022).

Ada banyak model pembangunan yang mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Terdapat empat jenis utama pembangunan di negara-negara berkembang. Jenis pembangunan yang pertama menitikberatkan pada pertumbuhan pendapatan nasional. Kedua, fokus pada pemerataan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. ketiga, fokus pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dan kelompok sasaran dalam mengidentifikasi kebutuhan dan keterlibatan dalam proses pembangunan. Sedangkan fokus kemudian pada

upaya peningkatan daya saing dalam menghadapi era kemandirian daerah (*djpb.kemenkeu.go.id*, 2019). Adapun lebih khusus, pemerintah daerah juga ikut serta dalam memaksimalkan strategi pengentasan kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, memfasilitasi usaha kecil, dan menyempurnakan program sosial.

Selain itu, dijelaskan juga dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulan Kemiskinan. Dalam peraturan tersebut terdapat tiga kelompok instrumen utama penanggulangan kemiskinan. Kelompok pertama yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga dimana bentuknya berupa pemberian fasilitas seperti layanan kesehatan dan pendidikan. Program penanggulangan kedua yaitu program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan potensi dan kemampuan suatu kelompok masyarakat. Program penanggulangan kemiskinan ketiga yakni menitikberatkan pada pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil (UMKM).

Tidak hanya tiga kelompok program diatas, adapun program lain yang diupayakan pemerintah Republik Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan. Program perlindungan sosial menjadi salah satu program yang sejalan dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan ini bisa memberikan pengaruh positif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sejauh ini, program perlindungan

sosial sudah menunjukkan hasil yang cukup baik dimana tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari 13,3% pada 2010 menjadi 8,4% pada 2021. Pemerintah terus berupaya menurunkan kemiskinan sesuai target. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD sebesar Rp10,3 miliar untuk program perlindungan sosial yang disalurkan ke kelompok masyarakat miskin (djk.kemenkeu.go.id, 2022).

Penanganan permasalahan kemiskinan juga terdapat dalam al-Qur'an dimana terdapat petunjuk agar umat Islam juga bisa keluar dari masalah kemiskinan (Hakim and Syaputra, 2020). Seperti yang dijelaskan dalam QS. Hud/11: 6 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuz)” (QS. Hud/11: 6)

Makna dari ayat di atas menerangkan bahwa Allah telah menjamin rezeki semua makhlukNya sebagai bentuk dari karuniaNya dan Dia mengetahui segalanya karna sudah tertulis disatu kitab disisi Alah. Akan tetapi, rezeki didapatkan juga dengan sebuah usaha dan kerja keras yang harus diupayakan oleh seluruh umat.

Melanjutkan mengenai strategi pengentasan kemiskinan, terdapat komponen fiskal yang dimana juga ikut berperan dalam program yang diupayakan oleh pemerintah. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah (Kementerian Keuangan, 2017). Komponen APBD diantaranya adalah pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan pendapatan lain daerah yang sah (Paat *et al.* 2019).

Berdasar pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari uang APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendukung kebutuhan daerah dalam proses pelaksanaan desentralisasi. Anggaran dimaksudkan untuk mengurangi kesenjangan anggaran antara pemerintah dengan daerah dan antar pemerintah daerah. Pengelolaan anggaran yang tepat dapat meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Dana perimbangan digunakan untuk mendukung program-program yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pengentasan kemiskinan (Kadafi dan Murtala, 2020). Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Paat *et al.* (2017) dengan hasil dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Kota Bitung.

Belanja daerah merupakan bagian lain dari APBD. Anggaran daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 merupakan uang pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran periode tahun anggaran pemerintah daerah

yang bersangkutan dengan tidak mendapat penggantian. Belanja daerah dibagi menjadi empat kategori, yaitu belanja pegawai, belanja modal, barang dan jasa, dan lain-lain. Menurut PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah, belanja modal digunakan untuk pengeluaran uang guna pembelian atau penyediaan barang yang nilainya kurang dari dua belas bulan untuk penggunaan jasa dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal biasa terealisasikan dalam peranannya membantu pengadaan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi hingga menciptakan kesejahteraan masyarakat yang merata (Waryanto, 2017). Dalam penelitian Saerang et al. (2021), belanja modal memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana kenaikan belanja modal akan meningkatkan kemiskinan.

Pengeluaran belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah lainnya. Dalam Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah dijelaskan bahwa belanja bantuan sosial adalah pengeluaran dalam bentuk pengiriman uang, barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah pusat atau daerah untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian Sumiyarti (2022), belanja bantuan sosial memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kemiskinan.

Kesejahteraan masyarakat juga bisa disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), jumlah penduduk, dan teknologi merupakan beberapa faktor pendukung. SDM

adalah salah satu alat ukur pembangunan ekonomi. Semakin baik kualitas SDM tersebut, maka produktivitas di negara tersebut juga semakin baik. Modal manusia bisa dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan tenaga kerja yang dimiliki (Rahmawati, 2019).

Salah satu alat ukur melihat kualitas hidup manusia adalah dengan IPM. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis komponen dasar kualitas hidup, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan standar hidup yang layak. Selain itu juga merupakan salah satu indikator pengukuran keberhasilan pembangunan. IPM berperan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan, kenaikan nilai IPM artinya kualitas juga semakin baik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) bahwa IPM memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dimana IPM dapat membangkitkan produktivitas serta pendapatan guna menurunkan kemiskinan.

Keberhasilan pembangunan manusia juga tidak lepas dari penyerapan tenaga kerja yang menjadi modal untuk pembangunan daerah guna menurunkan kemiskinan. Setiap tenaga kerja merupakan angkatan kerja, dan kesempatan kerja selalu dibutuhkan untuk angkatan kerja guna memulai menjadi tenaga kerja. Begitupun dengan penelitian dari Wahyudi dan Yuliarmi (2018) bahwa tenaga kerja memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan kemiskinan, dimana tenaga kerja yang meningkat akan membentuk produktivitas serta menekan pengangguran sejalan dengan mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, diketahui jika beberapa komponen dari APBD seperti dana perimbangan, belanja modal, dan belanja bantuan sosial setiap tahunnya pasti berbeda. Begitupun dengan tingkat indeks pembangunan manusia dan tingkat partisipasi angkatan kerja yang setiap tahunnya bisa mengalami kenaikan. Maka dari itu, bukan tidak mungkin mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh dana perimbangan, belanja modal, belanja bantuan sosial, IPM, dan tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini berjudul “Analisis Determinan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2017-2021” dengan studi kasus 34 provinsi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang dapat dibuat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021?

5. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Belanja Bantuan Sosial terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017-2021.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi berbagai bidang, yaitu:

1. Teoritis

Secara teori, diharapkan bisa mendorong pemerintah untuk menemukan penyelesaian terkait permasalahan kemiskinan dan bisa memajukan perekonomian di Indonesia.

2. Praktis

a. Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu penulis dalam hal pengetahuan dan juga pengalaman untuk memahami dan memperluas ilmu yang telah diperoleh dalam bangku perkuliahan serta bisa membandingkan antara teori dan praktik dalam bidang ini.

b. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman mengenai kemiskinan serta berbagai faktor yang mempengaruhi kenaikan kemiskinan.

c. Pengambil Kebijakan

Diharapkan bisa mendapatkan penjelasan yang berguna bagi para pembaca untuk mengetahui mengenai kemiskinan dan berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan agar mencapai kesejahteraan dan perekonomian yang maju.